



Aceh

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5203,5204, (021) 3440107,3865130 FAKSIMILE 3846402
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-4338 /PB.1/2018
Sifat : Sangat segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penandatanganan Pakta Integritas Pejabat Administrator Direktorat Jenderal Perbendaharaan

21 Mei 2018

Yth. Terlampir

Sehubungan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 9 Mei 2018 di Aula Dhanapala, Gedung Soetikno Slamet, Kementerian Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-16/MK.1/2012 tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan, diatur bahwa salah satu upaya untuk mengokohkan komitmen Kementerian Keuangan dalam rangka mencegah dan memberantas tindakan koruptif adalah melalui Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu dengan pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelaksanaan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas wajib diikutsertakan dalam setiap pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Selanjutnya dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, juga diatur bahwa penerapan kode etik dan disiplin pegawai dilaksanakan melalui kegiatan diantaranya penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang diperbaharui pada setiap awal tahun dan dalam hal terjadi perubahan jabatan/unit kerja pegawai yang bersangkutan.
3. Menindaklanjuti ketentuan di atas, para Pejabat Administrator dimaksud telah melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas pada saat pelantikan, untuk selanjutnya Pakta Integritas tersebut perlu ditandatangani atasan langsung Pejabat Administrator masing-masing.
4. Memperhatikan hal-hal tersebut, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk:
 - a. Menandatangani Pakta Integritas para Pejabat Administrator dimaksud (sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran II);
 - b. Memerintahkan kepada pejabat tersebut untuk mengunggah pakta integritas dimaksud dengan format PDF pada aplikasi PbnOpen (panduan *upload* pakta integritas mengacu pada surat Sekretaris DJPb Nomor S-83/PB.1/2018 tanggal 4 Januari 2018);
 - c. Menyampaikan kembali dokumen asli Pakta Integritas tersebut kepada Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Haryana
NIP 19600603 198502 1 001

LAMPIRAN I

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-4338/PB.1/2018

Tanggal : 21 Mei 2018

Kepada Yth.:

1. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
2. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
3. Direktur Sistem Manajemen Investasi;
4. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Direktur Sistem Perbendaharaan;
7. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
8. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh;
9. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara;
10. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat;
11. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau;
12. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau;
13. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi;
14. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan;
15. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung;
16. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu;
17. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung;
18. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten;
19. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta;
20. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat;
21. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta;
23. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur;
24. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat;
25. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan;
27. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur;
28. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara;
29. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
30. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
31. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan;
32. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat;
33. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah;
34. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
35. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo;
36. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara;
37. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara;
38. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku;
39. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat;
40. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua.

LAMPIRAN II

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S- 4338 /PB.1/2018

**Daftar Penandatanganan Pakta Integritas Pejabat Administrator Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Yang Dilantik pada tanggal 9 Mei 2018 di Jakarta**

No.	Nama	NIP	Pangkat (Gol.)	Jabatan	Unit Eselon II
1	Ahmad Fahmi	19641020 198503 1 003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh
2	Fauzil Amri	19611102 198509 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kepatuhan Internal	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh
3	Herkwin	19720309 199803 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Banda Aceh	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh
4	Muliasyah	19620715 198303 1 002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Lhok Seumawe	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh
5	Iman Haidir	19731228 199511 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Meulaboh	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh
6	Syahriza	19610508 198503 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Langsa	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh